



Pusat Peradilan Federal

“untuk lebih memajukan pengembangan dan pemakaian administrasi yudikatif yang lebih baik” melalui pendidikan & penelitian



Sistem Yudisial A.S.

- Federal
 - Konstitusi A.S. (Artikel I & III)
 - Kongres (pengadilan rendah, yurisdiksi)
- Negara bagian
 - 50 Negara bagian (& D.C., Puerto Rico)
 - Konstitusi negara bagian & undang-undang
 - Sistem yudisial independen
- Kebanyakan hukum A.S. = hukum negara bagian
 - lebih 90% kasus pengadilan terjadi di pengadilan negeri

Yurisdiksi: Negara Bagian

- Perselisihan Perjanjian
 - Masalah rumah tangga
 - Kerugian perorangan
 - Pelanggaran pidana
 - Gugatan/Tuntutan Berdasarkan Hukum Negara Bagian
 - Gugatan/Tuntutan Berdasarkan Hukum Federal
- *Banyak negara bagian memiliki pengadilan khusus, termasuk: keluarga, remaja, narkoba, pajak, lalu-lintas*

Yurisdiksi: Pengadilan Federal

- Subyek
 - Konstitusi A.S. & undang-undang
 - Perjanjian
 - Kepailitan, pabean, paten, kekuasaan kepangkatan, niaga int'l
- Kelompok
 - Pemerintah Federal atau Negara Bagian
 - Duta besar atau pejabat pemerintah
 - Negara-negara asing
- Keragaman
 - Penduduk negeri yang berbeda & jumlah sebesar > \$75.000



Struktur Pengadilan Federal



Mahkamah Agung

9 Hakim Agung

Kasus: Petisi: 9,302 ; Tinjauan Penuh: 82

Pengadilan Banding

179 Hakim di 13 Sirkuit

6 – 28 Hakim/sirkuit

Kasus: 55,750

Pengadilan Distrik

678 Hakim di 94 Distrik

2 – 27 Hakim/distrik

Kasus: 373,890

Federal Court Structure

**(2011, jumlah dalam perkiraan)*

**Numbers refer to authorized judgeships*

Pengadilan Khusus Federal

- Niaga Internasional
- Gugatan Federal
 - -Gugatan moneter terhadap Pemerintah AS
- Kepailitan
 - – Yurisdiksi atas hal-hal kepailitan
- Pengadilan Banding bagi Angkatan Bersenjata
- Pengadilan Banding bagi Tuntutan Veteran
- Pengadilan Pajak/Bea Cukai
- Badan Administratif Tribunal
 - “Hakim Undang-undang Administratif”
 - Persengketaan menyangkut undang-undang federal tertentu, termasuk *social security*, imigrasi, buruh

Profesi Hukum

Pendidikan Hukum

- Universitas: 4 tahun, pelajaran umum
- Sekolah Hukum: 3 tahun
 - Inti: prosedur sipil, undang-undang konstitusional, undang-undang pidana, etika, bukti, hak milik kekayaan, perkara ganti rugi perdata, tulisan hukum
 - Pilihan: undang-undang niaga, hak-milik kekayaan intelektual, undang-undang buruh, undang-undang kesehatan, hukum internasional, pelatihan advokasi, dll.

Akreditasi "Bar"

- Ujian
- Izin masuk ke organisasi Bar di negara bagian
 - Lulus dari sekolah hukum yang berakreditasi
 - 200 sekolah hukum yang berakreditasi beroperasi di A.S. (*4 negara bagian mengakui non-akreditasi*)
 - Sekolah Hukum Berlanjut bagi para Pengacara (*45 negara bagian mewajibkan*)

Ruang Lingkup Praktek Hukum

- Sektor Swasta (firma hukum, perusahaan, LSM, yayasan, dsb.)
- Sektor Masyarakat (pemerintah, kehakiman, legislatif)

Kantor Kehakiman: Persyaratan

- Tak ada ujian
- Sedikit kriteria untuk penyeleksian formal
- Pelatihan
 - Federal:
 - Tak ada pelatihan wajib pra-kehakiman
 - Sukarela untuk melanjutkan sekolah kehakiman
 - Negara Bagian:
 - Wajib ikut pelatihan pra-kehakiman: 28 negara bagian
 - Wajib ikut pendidikan kehakiman berlanjut: 43 negara bagian
- Para calon diseleksi dari:
 - Praktisi-praktisi berpengalaman (pemerintah dan swasta)
 - pengadilan negara bagian
 - Pengadilan rendah federal
 - Kalangan akademis

Seleksi Kehakiman: Negara bagian

- Metodenya bervariasi antar Negara bagian:
 - Pemilihan (33 negara bagian)
 - Pilihan terpopuler: mendukung (12) atau tak-mendukung (21)
 - Diangkat oleh gubernur
 - diseleksi atas dasar prestasi oleh Komisi
 - dipilih atas dasar “retensi”
 - Diangkat oleh badan legislatif (2 negara bagian)
- Masa perpanjangan (antara: 2-14 tahun)

Seleksi Kehakiman: Federal

Artikel III Para Hakim

- Dinominasikan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat
 - Rekomendasi: legislator, lainnya (*biasanya dari partai politik President*)
 - Investigasi: White House, Department Kehakiman, FBI
 - Nominasi: Diserahkan oleh Presiden ke Senat
 - *Tinjau kembali: American Bar Association** (**tak wajib secara hukum, tak-mengikat*)
 - Sidang: Komite Kehakiman Senat
 - Ambil suara/vote: Senat
- Ikatan dinas seumur hidup (*"selama berkelakuan baik"*)

Seleksi Kehakiman: Federal

Artikel I Para Hakim

- **Kepailitan**

(Yurisdiksi atas hal-hal kepailitan)

Diangkat oleh Pengadilan Banding selama periode jabatan 14 tahun dan dapat diperpanjang

- **Hakim Pengadilan tingkat Magistrat**

(Pra-peradilan, manajemen kasus, mediasi, beberapa pengadilan sipil)

- Diangkat oleh Pengadilan Distrik hingga masa perpanjangan waktu 8-tahun

- **Gugatan Federal**

(Gugatan moneter terhadap pemerintah A.S.)

- Diangkat oleh Presiden, atas persetujuan Senat, selama periode jabatan 15 tahun dan dapat diperpanjang

Hakim Federal: Ketua & Posisi Senior

- Ketua Jaksa Agung
 - Dinominasi oleh Presiden, dikonfirmasi oleh Senat
 - Tugas: Memimpin sidang pengadilan, Mukthamar Yudisial, AO, FJC, Smithsonian, National Gallery of Art
- Ketua Hakim (*Pengadilan Banding, Pengadilan Distrik*)
 - Ditugasi lewat senioritas (*lamanya di pengadilan*)
 - Jangka waktu 7-tahun
 - Mengawasi administrasi pengadilan
 - Mendelegasikan pada Pegawai Admin. Pengadilan
 - Bisa mengurangi timbunan kasus
- Hakim Senior (*boleh pilih*)
 - Persyaratan: 65 tahun
 - Aturan: jika umur + tahun berdinis = 80
 - Mengurangi timbunan kasus

Pengadilan Negara Statistik

Jumlah Hakim

Trial Court Judges		Total
Yurisdiksi Umum	Yurisdiksi Terbatas	
11,925	18,452	30,377

Judicial officers in state courts comprise judges, commissioners, masters, referees, and other quasi-judicial officers who adjudicate all or part of a court case.

Jumlah Kasus-kasus

Sidang		Pengadilan tinggi	Pengadilan Khusus
Kriminal	Sipil		
20,700,000	19,500,000	273,061	65,800,000 <i>(remaja, lalu-lintas, rumah tangga)</i>

Pengadilan Federal Statistik

Jumla Hakim*

First Instance		Pengadilan tinggi (Mahkamah & Menengah)	Total
Yurisdiksi Umum	Yurisdiksi Terbatas		
686 <i>(Distrik, Niaga Int'l)</i>	925 <i>Kepailitan, Magistrat</i>	188	1,799

Jumla Kasus-kasus

First Instance		Pengadilan tinggi	Khusus
Kriminal	Sipil		
79,551	294,336	55,753	1,735,010 <i>(mostly bankruptcy and federal claims cases)</i>

* Tak termasuk Hakim Senior
Federal Court Statistics

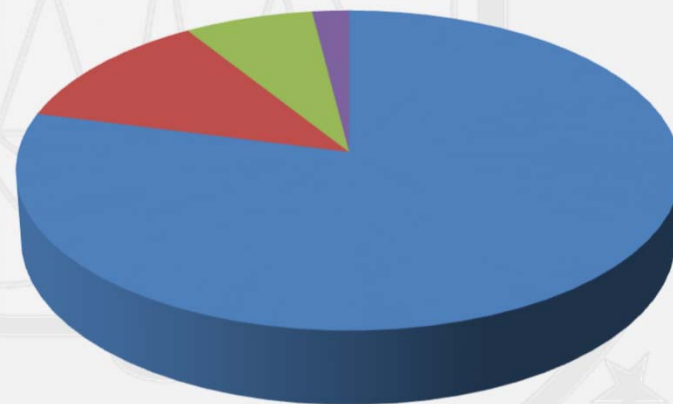
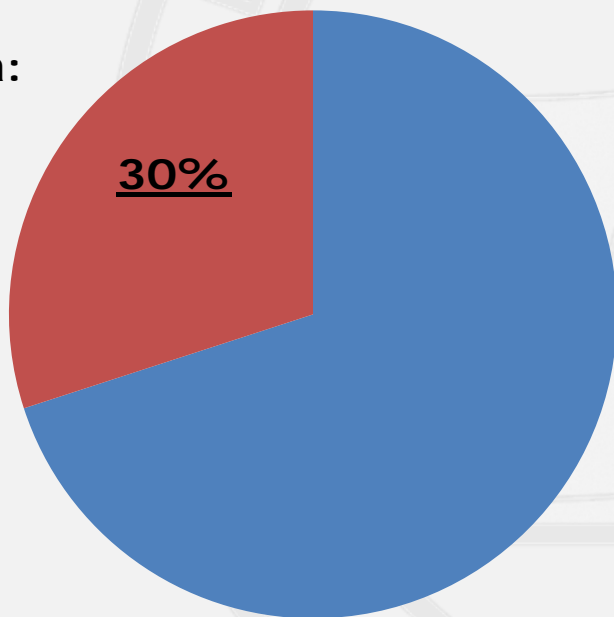
Source: Kantor Administratif A.S. 2011

Keragaman Pengadilan Federal

Jender

Ras

Wanita:



- Caucasian (79%)
- African American (12%)
- Hispanic (7%)
- Asian American (2%)

Diversity in the Federal Courts

* Hakim aktif; Kantor Sejarah FJC (kini sampai July 2012)

Pegawai Pengadilan: Pengadilan Banding (Pengadilan ukuran sedang)

Hakim	Staf Pengadilan	Staf Hakim
Ketua Pengadilan Banding 12 hakim banding	Circuit Executive Panitera Staf Pengadilan: +/- 69 Staf Penasihat Hukum: 27 Conference Attorneys: 3	Staf Legal: 3 Sekretaris: 2

- Circuit Executive: mengelola urusan administratif di seluruh sirkuit yang bersangkutan dan membantu Ketua Pengadilan Banding
- Panitera: mengatur penjadwalan, anggaran, kepegawaian, statistik, pelayanan ruang sidang, distribusi opini dan perintah hakim; memastikan kepatuhan pada peraturan prosedural; dapat memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan mosi prosedural
- Staf Penasihat Hukum: membantu penelitian dan pembuatan draft memorandum, perintah dan opini; mengatur proses *briefing* dan *filing*; memberikan bantuan pra-sidang
- Conference Attorney: mengkoordinasikan dan mengelola pertemuan-pertemuan tentang penyelesaian perkara dihadapan hakim (di ruangnya) melalui proses mediasi (*settlement conferences*)
- Staf Legal: umumnya adalah posisi yang diduduki selama 1-2 tahun (kadang lebih lama); menyelenggarakan penelitian hukum, membuat draft memo; menyiapkan draft memo untuk diberikan kepada para hakim; dapat membuat atau mengedit opini hukum; melakukan verifikasi atas kutipan-kutipan yang dikemukakan oleh para pihak

Pegawai Pengadilan: Pengadilan Distrik

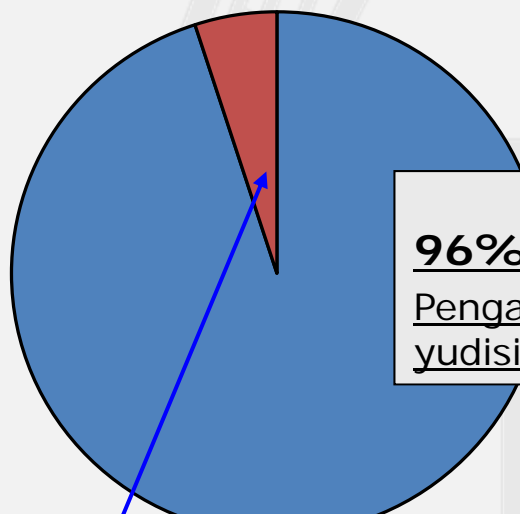
Hakim	Staf Pengadilan	Staf Hakim
Hakim Ketua Pengadilan Distrik 6 hakim distrik 3 hakim magistrat	Panitera Pegawai Pengadilan: +/- 80 Penasihat Hukum Pro Se: 4	Asisten: 2 Sekretaris: 1

- Panitera: kepala administratif; mengatur proses perkara, catatan, dana, peralatan, kepegawaian, otomasi, statistik, layanan persidangan, administrasi juri; menyiapkan laporan tentang pengadilan; menjembatani hubungan dengan badan peradilan, pemerintah
- Hakim Magistrat: menjabat di pengadilan distrik dengan masa jabatan 8 tahun; menangani perkara pelanggaran pidana; dapat, atas persetujuan para pihak, memutus di persidangan perkara perdata; mengatur proses *discovery* (para pihak memberikan dokumen yang dimilikinya untuk diperiksa oleh pihak lawan), sidang pemeriksaan bukti-bukti; temuan & rekomendasi tentang mosi memberhentikan ataupun meneruskan perkara
- Penasihat Hukum Pro Se: membantu penggugat pro se (yang tidak terwakili oleh penasihat hukum), memberi saran tentang apa yang harus dipenuhi secara prosedural dan persyaratan pengajuan
- Asisten Hakim: bersama para pihak mengkoordinasikan penjadwalan perkara, konferensi, dan permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah persidangan; melakukan penelitian hukum dan membuat draft memorandum; menyiapkan berita acara persidangan untuk pengadilan tingkat banding; dapat membuat, mengedit draft opini hakim
- Magang: mahasiswa jurusan hukum; membantu asisten hakim dalam penelitian dan memorandum

Pendanaan Pengadilan Federal

Anggaran untuk badan peradilan Federal: \$6.5 milyar (FY 2014)

(Ikurang dari 1/5 dari 1% anggaran AS)



96% pengadilan Banding, Pengadilan Distrik, pelayanan yudisial lainnya

4% Mahkamah Agung, Sirkuit Federal, Pengadilan Niaga Int'l, Kantor Administratif, FJC, Komisi Pemidanaan

Gaji Badan Peradilan

(2014)

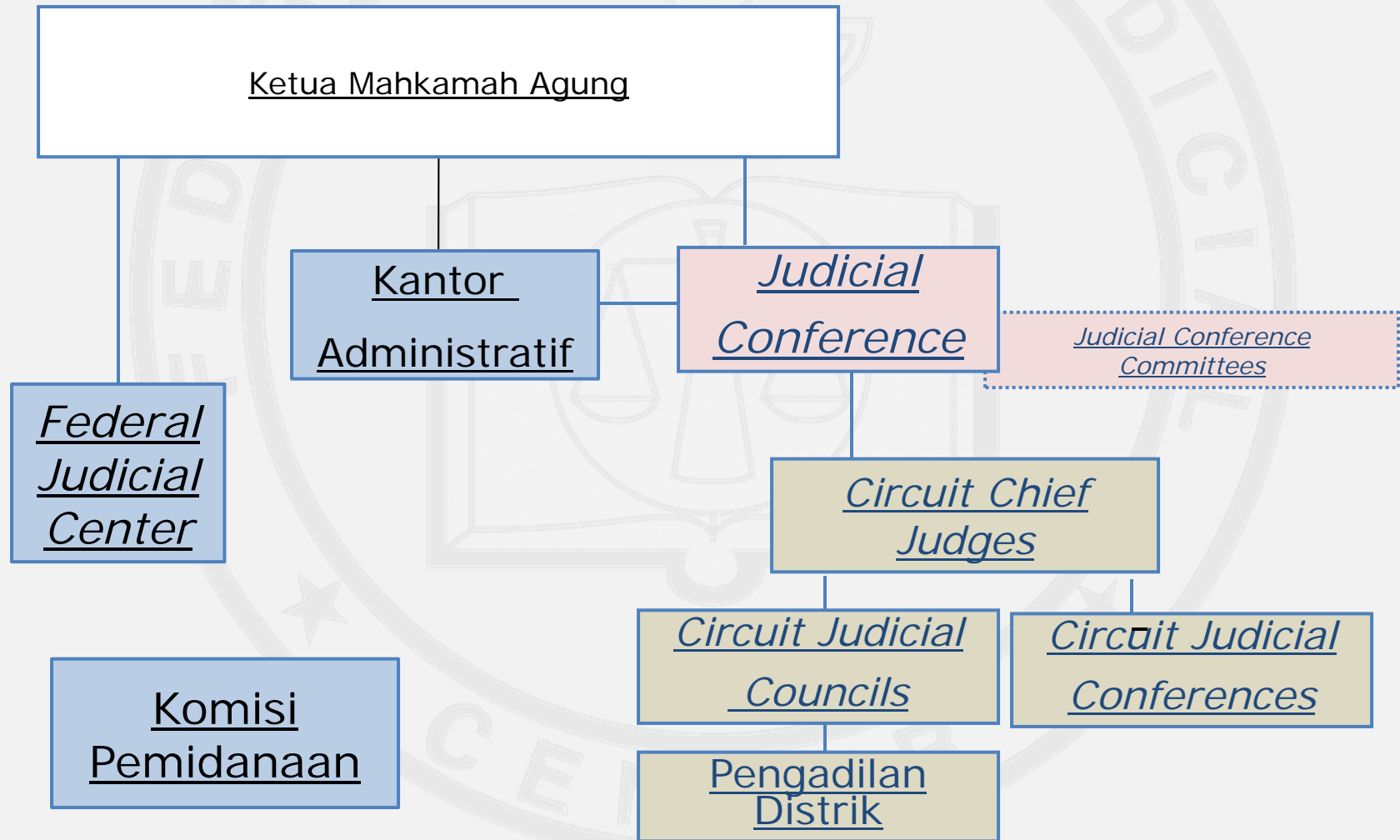
Mahkamah Agung: \$244,400 (KMA: \$255,500)

Pengadilan Banding: \$211,200

Pengadilan Distrik: \$199,100

Hakim Kepailitan/Magistrat: \$174,000

Administrasi Badan Peradilan Federal



Pedoman Perilaku dan Disiplin Badan Peradilan

UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT

Pasal III, Ayat I: Hakim melayani “dalam perilaku yang baik”

Pasal II, Ayat IV: Hakim dapat diturunkan dari jabatannya hanya untuk alasan “kejahatan dan pelanggaran berat”

UNDANG-UNDANG

Judicial Conduct and Disability Act of 1980

Financial Disclosure (5 U.S.C §101-112)

Limits on Outside Income (5 U.S.C. §501-505)

Disqualification (28 U.S.C. §455)

KODE PERILAKU HAKIM AS

Diadopsi oleh *Judicial Conference* Amerika Serikat

Panduan-panduan yang tidak mengikat

Judicial Conference Committee: Sebagai Penasihat Kode Perilaku

Undang-Undang *Judicial Conduct and Disability*: Proses Pengajuan Gugatan

SIAPA

- Penggugat, penasihat hukum, anggota masyarakat, atau Ketua Pengadilan Sirkuit dapat mengajukan gugatan kepada Panitera Sirkuit Pengadilan Banding

APA

- Pelanggaran yudisial **bukan** keberatan atas putusan
- Konflik, bias, penundaan tak berdasar, atau pelanggaran-pelanggaran etika lainnya

BAGAIMANA

- Ulasan Hakim Ketua; dapat diberhentikan atau dirujuk ke Komite Khusus untuk melakukan pemeriksaan
- Komite Khusus mengirim temuannya ke *Circuit Judicial Council*. Jika ditemukan pelanggaran, Council dapat memberlakukan “upaya korektif” atau merujuk ke *Judicial Conference*

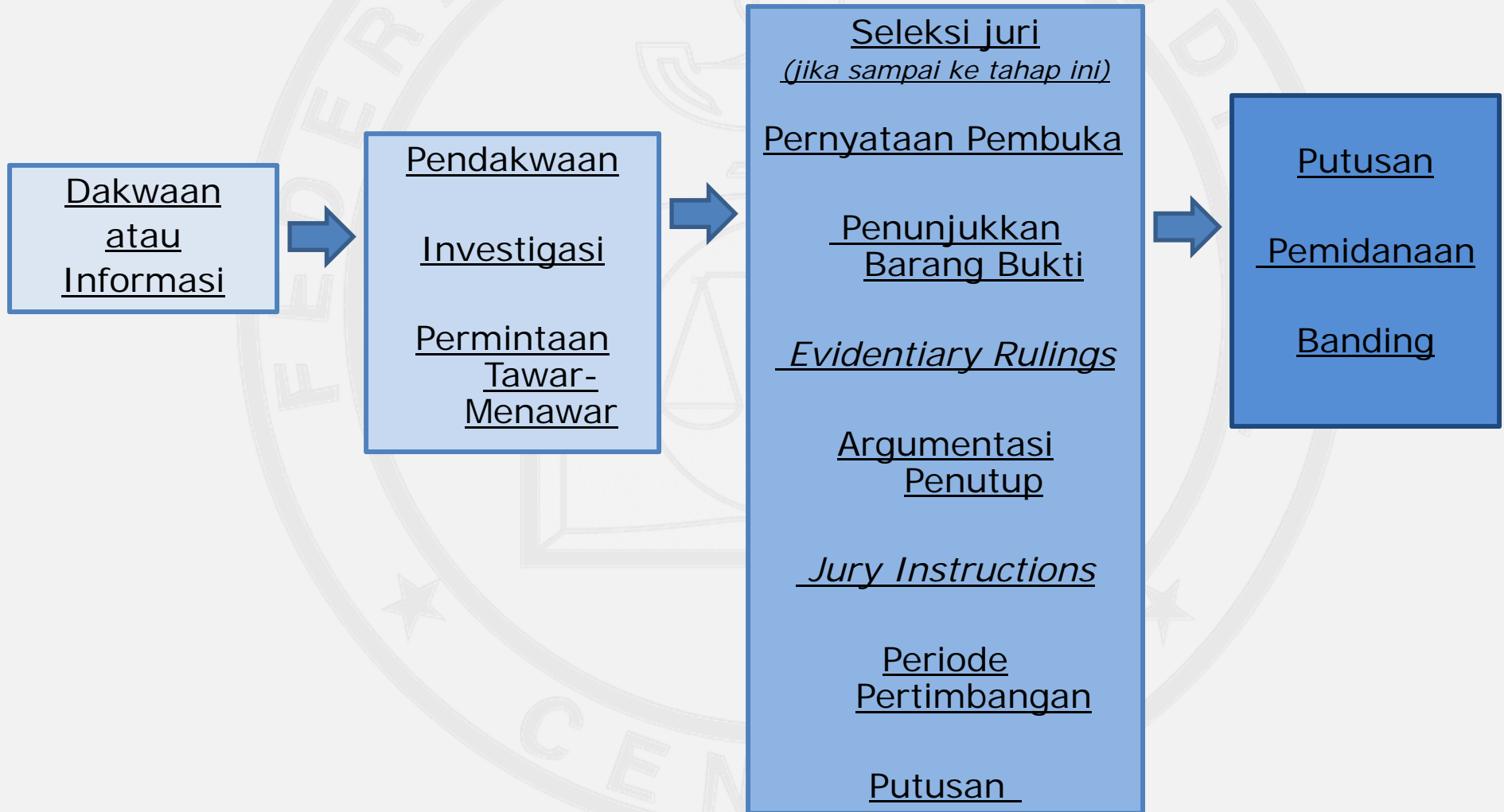
PERBAIKAN

- Upaya korektif: tidak ada perkara baru, konseling informal, kecaman, teguran
- *Judicial Conference* dapat mengirimkan ke DPR untuk kemungkinan pencopotan dari jabatan
- DPR (House of Representatives) melakukan investigasi; mungkin akan ada permintaan pertanggungjawaban
- Jika hakim diminta pertanggungjawabannya, maka akan dilakukan dihadapan MPR (Senate)
- Jika diputuskan bersalah oleh $\frac{2}{3}$ anggota Senate setelah itu, maka hakim diberhentikan dari jabatannya *Ada beberapa hakim AS yang diberhentikan: 15 dakwaan, 8 dihukum (*hingga 2012*)*

Praktek Peradilan AS

- Common Law
 - Preseden
 - Statuta
 - Peraturan tentang prosedur & bukti
- Proses Persidangan
 - Adversarial
 - Peranan hakim & penasihat hukum
 - Persidangan
 - Juri atau hakim
 - Sidang berkelanjutan (beberapa hari sidang berturut-turut dengan sedikit penundaan)
 - Transkrip verbatim

Jalur yang Dilalui Sebuah Perkara Pidana



Plea Bargaining

Step 1

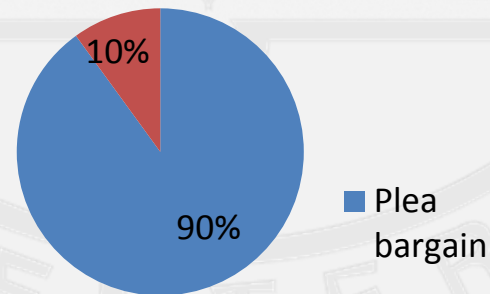
Negotiations between prosecutor and defendant's attorney: defendant agrees to admit guilt in exchange for a reduced sentence

Step 2

Proposed agreement presented to judge for approval
Judge may reject proposed plea

Step 3

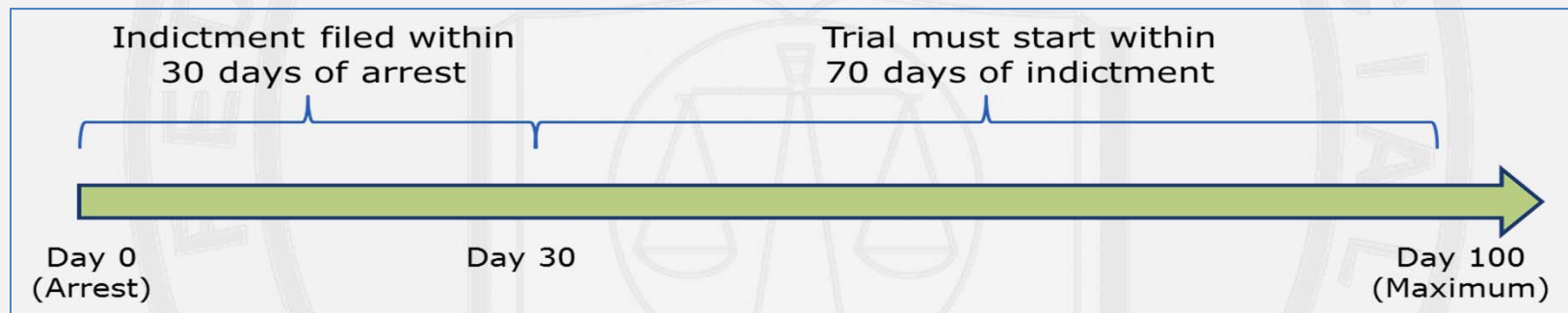
If plea bargain moves forward, judge conducts a hearing and questions the defendant to ensure that defendant is competent, understands the proceeding, and was not forced into pleading guilty



The vast majority of criminal cases in federal courts result in plea bargains.

Speedy Trial

- Sixth Amendment to U.S. Constitution: “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial....”
- Speedy Trial Act (1974): time limits for completing stages of prosecution



- A defendant may, and often does, consent to stopping the “speedy trial clock”
- The clock also stops during pretrial motions, unavailability of the defendant or key witness, interlocutory appeal
- Otherwise, failure of prosecution to adhere to time limits may result in dismissal of case

Jalur yang Dilalui Perkara Perdata

